SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LEMBAGA PENDIDIKAN

Aufatus Syakira Mardhatillah[1], Zulfani Sesmiarni[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : syakiraaufatus@gmail.com[1], zulfanisesmiarni@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), peran Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), implementasi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta keterkaitannya dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan akreditasi lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah dan kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa SPMI berfungsi sebagai mekanisme internal untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan siklus PPEPP secara sistematis dan berkelanjutan. Sementara itu, SPME berperan sebagai sistem penilaian eksternal melalui akreditasi untuk memastikan kesesuaian mutu dengan standar nasional. SNP menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Sinergi antara SPMI dan SPME terbukti penting dalam membangun budaya mutu, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : *Sistem Penjaminan Mutu, Mutu Pendidikan, SPMI, SPME, Akreditasi*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan, karakter, dan kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan zaman. Pendidikan yang berkualitas mampu menciptakan generasi yang memiliki daya saing tinggi, berakhlak mulia, serta mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan nasional (Tilaar, 2012).

Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemajuan suatu negara. Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan globalisasi. Sebaliknya, rendahnya mutu pendidikan dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga menghambat proses pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan sistem pengelolaan pendidikan (Sallis, 2015).

Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari hasil belajar peserta didik, tetapi juga dari efektivitas proses pembelajaran, kualitas tenaga pendidik, sistem manajemen lembaga pendidikan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pendidikan yang bermutu harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dengan demikian, mutu pendidikan harus dipandang secara menyeluruh dan melibatkan seluruh komponen pendidikan secara terpadu (Mulyasa, 2018).

Upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan suatu sistem yang mampu mengontrol, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, penjaminan mutu pendidikan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai strategi perbaikan berkelanjutan guna mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien (Suryosubroto, 2010).

Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh lembaga pendidikan untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Sementara itu, SPME dilakukan oleh lembaga eksternal melalui proses akreditasi sebagai bentuk evaluasi terhadap kelayakan dan kualitas lembaga pendidikan. Kedua sistem tersebut saling melengkapi dalam menciptakan budaya mutu di lingkungan pendidikan (Permendikbud No. 28 Tahun 2016).

SPMI memiliki peran penting dalam membangun kesadaran seluruh warga sekolah atau perguruan tinggi terhadap pentingnya budaya mutu. Melalui SPMI, lembaga pendidikan dapat melakukan identifikasi terhadap berbagai kekurangan dan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pelaksanaan SPMI dilakukan secara sistematis dan melibatkan seluruh unsur lembaga pendidikan agar tercipta komitmen bersama dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan (Dikti, 2020).

Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu. Siklus PPEPP menjadi landasan utama dalam proses pengelolaan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penetapan standar dilakukan sebagai acuan mutu, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan standar dalam kegiatan pendidikan. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar, diikuti pengendalian terhadap berbagai penyimpangan, serta peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan (Nasution, 2014).

Selain penerapan PPEPP, keberhasilan penjaminan mutu pendidikan juga berkaitan erat dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. Standar tersebut menjadi acuan utama bagi lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

Hubungan antara Standar Nasional Pendidikan dan akreditasi sangat erat karena akreditasi menjadi instrumen evaluasi untuk menilai tingkat pencapaian standar mutu oleh lembaga pendidikan. Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen sebagai bentuk pengakuan terhadap kualitas suatu institusi pendidikan. Hasil akreditasi tidak hanya menjadi indikator mutu lembaga, tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat dalam menilai kredibilitas dan kualitas layanan pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, implementasi siklus PPEPP, serta hubungan Standar Nasional Pendidikan dengan akreditasi lembaga pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep mutu pendidikan, sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal, siklus PPEPP, serta Standar Nasional Pendidikan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menguraikan konsep-konsep penting, membandingkan berbagai teori, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian pustaka

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu mekanisme yang diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, SPMI dilaksanakan secara mandiri oleh lembaga

pendidikan melalui keterlibatan seluruh unsur institusi, mulai dari pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, hingga peserta didik.

Penerapan SPMI menjadi sangat penting karena mutu pendidikan tidak dapat dicapai hanya melalui evaluasi hasil belajar peserta didik, tetapi juga harus memperhatikan kualitas proses pendidikan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, SPMI menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan mutu secara terus-menerus. Melalui sistem ini, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi kelemahan yang terdapat dalam proses pendidikan serta menyusun strategi perbaikan yang lebih efektif. Dalam praktiknya, SPMI memiliki tujuan utama untuk membangun budaya mutu di lingkungan pendidikan. Budaya mutu merupakan kondisi di mana seluruh unsur lembaga pendidikan memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap pentingnya peningkatan kualitas pendidikan. Dengan adanya budaya mutu, proses pendidikan dapat berlangsung secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

B. Konsep dan Struktur SPMI

Konsep dasar SPMI berlandaskan pada prinsip continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan melalui evaluasi dan pengembangan secara sistematis. SPMI juga mengadopsi prinsip manajemen mutu terpadu yang menempatkan kepuasan pemangku kepentingan sebagai salah satu orientasi utama.

Struktur SPMI terdiri atas beberapa komponen penting yang saling berkaitan, yaitu:

1. Penetapan standar mutu.
2. Pelaksanaan standar mutu.
3. Evaluasi pelaksanaan standar.
4. Pengendalian mutu.
5. Peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Penetapan standar mutu dilakukan dengan menentukan indikator-indikator kualitas pendidikan yang akan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar tersebut meliputi standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar tenaga pendidik, serta standar sarana dan prasarana pendidikan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan seluruh standar yang telah ditetapkan dalam proses pendidikan. Pada tahap ini, seluruh komponen lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program pendidikan sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana standar mutu dapat dicapai oleh lembaga pendidikan. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui monitoring, audit internal, observasi, dan analisis data pendidikan. Hasil evaluasi kemudian digunakan dalam tahap pengendalian mutu untuk melakukan tindakan korektif terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Setelah itu, lembaga pendidikan melakukan peningkatan mutu sebagai bagian dari upaya pengembangan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

C. Proses Penjaminan Mutu Internal

Proses penjaminan mutu internal dilakukan secara sistematis dan terencana. Tahap pertama adalah perencanaan mutu, yaitu proses menetapkan tujuan mutu dan indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan.Tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan pengendalian mutu. Pada tahap ini, seluruh program pendidikan dilaksanakan sesuai standar yang telah ditentukan. Pengendalian mutu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi dan audit internal menjadi bagian penting dalam proses

penjaminan mutu. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pendidikan, sedangkan audit internal bertujuan untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang berlaku. Setelah evaluasi dilakukan, lembaga pendidikan melaksanakan tindak lanjut dan perbaikan mutu. Tindak lanjut ini dapat berupa revisi kebijakan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, maupun penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih memadai.

D. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan mekanisme penilaian mutu pendidikan yang dilakukan oleh lembaga eksternal melalui proses akreditasi. SPME bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. SPME memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena melalui evaluasi eksternal, lembaga pendidikan dapat memperoleh penilaian objektif mengenai kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan. Selain berfungsi sebagai alat evaluasi, SPME juga berperan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pendidikan kepada masyarakat. Status akreditasi yang diperoleh suatu lembaga pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas institusi tersebut.

E. Peran Badan Akreditasi

Badan akreditasi memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi mutu pendidikan secara eksternal. Beberapa peran penting badan akreditasi antara lain:

- Menetapkan standar mutu pendidikan.
- Melakukan evaluasi dan verifikasi data.
- Memberikan sertifikat akreditasi.
- Melakukan monitoring dan reakreditasi.

Melalui proses akreditasi, lembaga pendidikan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat melakukan perbaikan mutu secara lebih terarah.

F. Proses Akreditasi Eksternal

Proses akreditasi dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah penilaian diri yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menilai tingkat ketercapaian standar mutu. Tahap berikutnya adalah evaluasi lapangan oleh tim asesor. Dalam proses ini asesor melakukan observasi langsung terhadap kondisi lembaga pendidikan, proses pembelajaran, serta sistem pengelolaan pendidikan. Setelah evaluasi selesai dilakukan, asesor menyusun laporan evaluasi yang menjadi dasar dalam penetapan status akreditasi. Selanjutnya, badan akreditasi menetapkan hasil akreditasi berdasarkan data dan temuan yang diperoleh selama proses penilaian.

G. Hubungan antara SPMI dan SPME

SPMI dan SPME merupakan dua sistem yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. SPMI berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu internal, sedangkan SPME berfungsi sebagai mekanisme evaluasi eksternal. Hubungan antara keduanya terlihat dalam proses koordinasi dan sinkronisasi standar mutu pendidikan. Hasil evaluasi eksternal dari SPME dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dalam implementasi SPMI.Selain itu, hubungan antara SPMI dan SPME juga terlihat dalam proses umpan balik dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Evaluasi eksternal yang dilakukan melalui akreditasi memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan untuk memperbaiki

sistem mutu internal. Sinergi antara kedua sistem tersebut sangat penting dalam membangun budaya mutu serta meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan kepada masyarakat.

H. Siklus PPEPP dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Siklus PPEPP merupakan inti dari implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan. PPEPP merupakan singkatan dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu pendidikan.

1) Penetapan Standar

Tahap penetapan standar merupakan proses menentukan berbagai standar mutu yang akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Penetapan standar dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga pendidikan, kebijakan nasional pendidikan, serta tuntutan perkembangan masyarakat.

2) Pelaksanaan Standar

Tahap pelaksanaan merupakan proses penerapan standar mutu dalam seluruh kegiatan pendidikan. Pada tahap ini, seluruh unsur lembaga pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3) Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, pengumpulan data, survei, maupun audit internal.

4) Pengendalian

Tahap pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar mutu berjalan sesuai dengan rencana. Apabila ditemukan penyimpangan, lembaga pendidikan melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

5) Peningkatan Standar

Tahap peningkatan dilakukan melalui pengembangan dan penyempurnaan standar mutu berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian. Peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pendidikan dapat terus berkembang.

6) Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. SNP berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus sebagai dasar dalam proses evaluasi dan akreditasi lembaga pendidikan.

SNP terdiri atas delapan standar utama, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Isi.
3. Standar Proses.
4. Standar Penilaian Pendidikan.
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Standar Sarana dan Prasarana.
7. Standar Pengelolaan.
8. Standar Pembiayaan Pendidikan.

Masing-masing standar memiliki peran penting dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan. Standar kompetensi lulusan berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kualitas lulusan, sedangkan standar proses mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Standar penilaian

pendidikan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik. Sementara itu, standar pendidik dan tenaga kependidikan menekankan pentingnya kompetensi profesional tenaga pendidikan. Selain itu, standar sarana dan prasarana bertujuan untuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, sedangkan standar pengelolaan dan pembiayaan berfungsi untuk menjamin efektivitas tata kelola pendidikan.

Dampak Akreditasi terhadap Kualitas Pendidikan

Akreditasi memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Melalui proses akreditasi, lembaga pendidikan terdorong untuk memenuhi berbagai standar mutu yang telah ditetapkan.Akreditasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan karena seluruh kegiatan akademik dan administratif harus didokumentasikan secara sistematis.Selain itu, status akreditasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang terakreditasi umumnya dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan lembaga yang belum terakreditasi. Akreditasi juga mendorong peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Di samping itu, lembaga pendidikan yang memiliki akreditasi baik biasanya lebih mudah memperoleh dukungan pendanaan dan kerja sama akademik.

KESIMPULAN

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan mekanisme penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Implementasi penjaminan mutu dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu secara internal melalui penerapan siklus PPEPP, sedangkan SPME berfungsi sebagai evaluasi eksternal melalui mekanisme akreditasi. Standar Nasional Pendidikan menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan penilaian mutu lembaga pendidikan. Sinergi antara SPMI dan SPME sangat penting dalam membangun budaya mutu, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, F., & Sari, N. H. (2025). Membangun kelayakan strategik pendidikan tinggi Islam melalui penjaminan mutu. *At-Ta'lim: Kajian Pendidikan Agama Islam, 7*(2), 167–183.

Arikunto, S. (2020). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Bumi Aksara.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2020). *Instrumen akreditasi satuan pendidikan*. BAN-S/M.

Dayanti, W. I., Wulandari, S. A., & Maryamah, S. (2025). Integrasi sistem penjaminan mutu eksternal dan internal berbasis internet dalam meningkatkan akuntabilitas pendidikan di era digital. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan Bahasa, 2*(4), 79–89.

Direktorat Penjaminan Mutu Pendidikan. (2018). *Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2019). *Managing for quality and performance excellence* (11th ed.). Cengage Learning.

Fiandi, A., & Sesmiarni, Z. (2023). Implementasi standar mutu dan sasaran mutu pada lembaga pendidikan. *EduTeach: Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran, 4*(1), 34–40.
Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education, 18*(1), 9–34.
Machali, I., & Kurniadin, D. (2012). *Manajemen pendidikan: Konsep dan prinsip pengelolaan pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
Mukhopadhyay, M. (2005). *Total quality management in education*. Sage Publications.
Mulyasa. (2019). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
Musfah, J. (2023). *Manajemen pendidikan: Teori dan kebijakan*. Prenadamedia Group.
Sallis, E. (2002). *Total quality management in education* (3rd ed.). Kogan Page.
Satori, D. (2016). *Pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan*. Alfabeta.
UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon declaration and framework for action*. UNESCO.